

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Periode 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami dan Laporan ini telah direview oleh Inspektorat Provinsi Jambi.

Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jambi, Desember 2023

KEPALA DINAS

ASRAF, S.Pt, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661120 199403 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat karunianya sehingga dapat kami selesaikan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023. Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas keuangan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan ini memuat segala transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam jangka waktu satu tahun, yang memuat, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Akhir kata, kami sadari bahwa laporan keuangan ini belum sempurna, sehingga kami mohon saran dan masukan, demi kemajuan dan perkembangan OPD kami.

Jambi, Desember 2023

KEPALA DINAS

ASRAF, S.P, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19661120 199403 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGUNG JAWAB	iii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	iv
LAPORAN OPERASIONAL	v
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	vi
NERACA	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan	3
1.3 Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan	4
1.4 Entitas	5
1.5 Kebijakan Konversi	6
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	
2.1 Kebijakan Keuangan	7
2.2 Pencapaian Target Kinerja	7
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	10
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
4.1 Entitas Pelaporan	15
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	15
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	15
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintah	16
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	18
BAB VI INFORMASI NON-KEUANGAN	
6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas	29
BAB VII PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan. Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumberdaya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisa atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan LAK. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu sebagai berikut:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menyajikan informasi pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun. Penyajian Laporan Realisasi APBD terdiri dari

anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan beserta realisasinya, yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai asset (kekayaan), hutang (kewajiban) dan ekuitas dana dari suatu entitas (untuk Tahun Anggaran 2023 posisi per 31 Desember 2023). Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas asset, kewajiban dan ekuitas dana.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- ❑ **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- ❑ **Kewajiban** adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- ❑ **Ekuitas Dana** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban pemerintah daerah.

3) Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi macro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

1.4. Entitas

Untuk Tahun Anggaran 2023, Entitas Akuntansi adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

1.5. Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa Laporan Keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan pos-pos Laporan Keuangan, struktur APBD (Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan), klasifikasi anggaran (Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan), serta Catatan atas Laporan Keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan pos-pos laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan konversi pos-pos laporan keuangan didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi dan khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, dimana dilakukan reklasifikasi untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Kebijakan Keuangan

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Jambi Tahun 2021-2024 mengacu pada visi yaitu "*Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT (Jambi Mantap)*". Penjabaran operasional lebih lanjut terhadap visi tersebut, diperlukan kebijakan fiskal dan keuangan, baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran.

Dari sisi penerimaan, telah dikeluarkan seperangkat Perda yang mengatur mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pajak dan retribusi daerah. Perda tersebut menyebutkan secara rinci mengenai jenis dan tarif masing-masing pajak dan retribusi daerah.

Dalam anggaran tahun 2023 ini penerimaan PAD jumlahnya belum signifikan untuk menopang belanja daerah dalam APBD, sehingga masih mengandalkan dukungan dana dari penerimaan transfer/bagi hasil dan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat.

Dari sisi pengeluaran, Perda APBD telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan. Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah ditetapkan perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda ini secara substansial mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Pencapaian Target Kinerja

APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023. Penyusunan APBD ini, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah, dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Upaya untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang sekaligus bertindak selaku pusat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Untuk DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja. Khusus untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam belanja langsung dan tidak langsung. Bagian belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Dari Rencana Strategis Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Provinsi Jambi Tahun 2021-2024 yang telah ditetapkan, memiliki misi sebagai berikut :

1. Memantapkan tata kelola pemerintah;
2. Memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah;
3. Memantapkan kualitas sumber daya manusia;

Sementara itu, visi misi Program Gubernur-Wakil Gubernur Jambi Al Haris-Abdullah Sani 2021-2024 adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan Covid-19;
2. Pengembangan kawasan kampung pangan terpadu, sentra produksi ternak dan kelautan;
3. Pengembangan SMK berbasis kompetensi dan keunggulan lokal;
4. Pusdiklat olahraga unggulan menuju industri olahraga;
5. Pengembangan kawasan ekonomi baru sentosa (Sengeti-Tungkal-Sabak) melalui pembangunan fasilitas umum kawasan, antara lain : (a) rumah sakit, (b) sekolah kemaritiman, dan (c) perguruan tinggi;
6. Peningkatan life skill santri/santriwati;
7. Percepatan pembangunan pabrik aspal karet;
8. Percepatan hilirisasi produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
9. Percepatan pembangunan kawasan industri dan Pelabuhan Ujung Jabung;
10. Percepatan pengembangan kspn kerinci seblat dan sekitarnya;
11. Percepatan pengembangan kawasan Geopark Merangin;
12. Percepatan pengembangan KSPN Candi Muaro Jambi dan sekitarnya;

13. Revitalisasi dan fasilitasi objek wisata unggulan di Kabupaten/Kota;
14. Peningkatan kajian literasi, festival dan lomba budaya daerah;
15. Internet gratis desa dan kota;
16. Digitalisasi pemasaran UMKM, pertanian dan kelautan;
17. Sinergi BUMD dengan UMKM produksi dan pemasaran produk;
18. Sinergi Bumdes dengan UMKM produksi dan pemasaran produk;
19. Penerapan e-katalog lokal dalam pengadaan barang dan jasa;
20. Peningkatan keterampilan tenaga siap kerja dan berwirausaha;
21. Pembentukan wilayah pertambangan rakyat (WPR) guna pengendalian aktivitas PETI;
22. Batanghari bersih;
23. Restorasi lahan terancam.

Pelaporan kinerja operasional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi disajikan tersendiri dalam "*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*" (LAKIP), yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Keputusan Nomor 239/IX/6/8/2003.

Dalam LAKIP tersebut, dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, dimana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2023.

Di dalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui perbandingan *output* dengan *inputnya*, serta tingkat efektivitas suatu program melalui perbandingan *outcome* dengan targetnya.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun anggaran 2023, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023, terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja.

Melalui Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023, maka anggaran pendapatan dan anggaran belanja, yaitu anggaran pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp. 365.000.000,00 dan setelah perubahan sebesar Rp 245.000.000,- atau berkurang sebesar Rp. 120.000.000,00 (32,88%). Anggaran belanja sebelum perubahan sebesar Rp 47.123.350.123,00 dan setelah perubahan sebesar Rp. 45.834.895.650,00 atau berkurang sebesar Rp. 1.288.454.473,00 (2,73%).

Secara garis besar, anggaran dan realisasi APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi (per 31 Desember 2023)

Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan	245.000.000,00	220.843.400,00	90,14
2	Belanja	43.529.895.650,00	41.926.056.615,00	96,32
	Surplus (Defisit)	(43.284.895.650,00)	(41.705.213.215,00)	(96,35)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember tahun anggaran 2023 sebagaimana tersebut di atas, kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada 31 Desember 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp 245.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 220.843.400,00 atau 90,14% yang berarti target pendapatan tidak tercapai yaitu Retribusi Pelayanan Pelabuhan Perikanan Kuala Tungkal yang disebabkan oleh kondisi tempat doocking kapal rusak atau sekitar 50 % yang bisa digunakan hanya untuk satu kapal saja. Di sisi lain, Belanja yang dianggarkan sebesar Rp 43.529.895.650,00 direalisasikan sebesar Rp 41.926.056.615,00 atau 96,32% dari anggaran. Dengan demikian dari anggaran defisit sebesar Rp 43.284.895.650,00 dapat direalisasikan menjadi defisit sebesar Rp 41.705.213.215,00 atau 96,35%.
2. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat tercapai target sehingga pelaksanaan kegiatan dipercepat agar realisasi belanja bisa mencapai target.

Untuk Belanja dianggarkan sebelum perubahan sebesar Rp 47.123.350.123,00 dan setelah perubahan sebesar Rp. 43.529.895.650,00 direalisasikan sebesar Rp 41.964.726.761,00 atau sebesar 96,40% yang berdasarkan pada Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan. Anggaran dan realisasi Belanja ini terdiri atas :

Tabel 2. Rincian Anggaran dan Realisasi

Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 (per 31 Desember 2023)

No	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	24.866.907.124	23.577.578.316	94,82	95,78	1.289.328.808
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	781.588.000	758.198.767	97,01	98,94	23.389.233
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	191.502.000	186.827.859	97,56	100,00	4.674.141
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	166.214.000	156.203.638	93,98	95,00	10.010.362
3	Evaluasi kinerja perangkat daerah	423.872.000	415.167.270	97,95	100,00	8.704.730
	Administrasi keuangan perangkat daerah	20.094.305.892	19.187.172.766	95,49	95,58	907.133.126
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	19.722.315.992	18.914.984.366	95,91	96,00	807.331.626
2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	371.989.900	272.188.400	73,17	73,17	99.801.500
	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	148.821.922	148.158.731	99,55	100,00	663.191
1	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	148.821.922	148.158.731	99,55	100,00	663.191

No	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
Administrasi kepegawaian perangkat daerah		293.638.356	291.909.327	99,41	100,00	1.729.029
1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	150.381.000	150.350.000	99,98	100,00	31.000
2	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	21.950.000	21.588.571	98,35	100,00	361.429
3	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	121.307.356	119.970.756	98,90	100,00	1.336.600
Administrasi umum perangkat daerah		823.931.826	821.442.707	99,70	100,00	2.489.119
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	9.420.000	94,20	100,00	580.000
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	97.863.826	97.358.411	99,48	100,00	505.415
3	Penyediaan bahan logistik kantor	20.000.000	18.597.000	92,99	100,00	1.403.000
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00	0,00
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.998.000	4.998.000	100,00	100,00	0,00
6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	651.070.000	651.069.296	100,00	100,00	704
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		1.476.789.538	1.275.299.060	86,36	100,00	201.490.478
1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	702.970.000	562.000.000	73,95	100,00	140.970.000
2	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	0	0	0,00	0,00	0
3	Pengadaan mebel	30.307.072	30.306.000	100,00	100,00	1.072
4	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	121.229.886	121.221.000	99,99	100,00	8.886
5	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	600.000.000	539.521.000	89,92	100,00	60.479.000
6	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	22.282.580	22.251.060	99,86	100,00	31.520
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		637.490.780	535.831.732	84,05	84,15	101.659.048
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	4.400.000	88,00	100,00	600.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	632.490.780	531.431.732	84,02	84,02	101.059.048
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		610.340.810	559.565.226	91,68	91,77	50.775.584
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	514.490.370	488.993.316	95,04	95,04	25.497.054
2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	72.511.200	63.741.910	87,91	87,91	8.769.290
3	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	23.339.240	6.830.000	29,26	31,65	16.509.240

No	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil		1.178.508.927	1.123.506.640	95,33	100,00	55.002.287
Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi		1.178.508.927	1.123.506.640	95,33	100,00	55.002.287
1	Penyusunan dan penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	238.053.000	228.626.650	96,04	100,00	9.426.150
2	Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat	940.455.927	894.879.990	95,15	100,00	45.575.937
Program pengelolaan perikanan tangkap		6.804.278.904	6.756.444.636	99,30	100,00	47.834.268
Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil		3.529.221.620	3.513.702.983	99,56	100,00	15.518.637
1	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	3.529.221.620	3.513.702.983	99,56	100,00	15.518.637
Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya		1.239.384.484	1.233.928.596	99,56	100,00	5.455.888
1	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	1.239.384.484	1.233.928.596	99,56	100,00	5.455.888
Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi		2.035.672.800	2.008.813.057	98,68	100,00	26.859.743
1	Pelaksanaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	1.651.640.000	1.630.985.771	98,75	100,00	20.654.229
2	Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan perikanan	384.032.800	377.827.286	98,38	100,00	6.205.514
Program pengelolaan perikanan budidaya		5.438.235.578	5.423.260.858	99,72	100,00	14.974.720
Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut		5.438.235.578	5.423.260.858	99,72	100,00	14.974.720
1	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	4.997.378.205	4.983.952.347	99,73	100,00	13.425.858
2	Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	262.427.000	260.727.000	99,41	100,00	1.541.600
3	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di laut dan lintas daerah kabupaten/kota	178.588.773	178.581.511	100,00	100,00	7.262
Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		3.691.382.400	3.547.503.880	96,10	100,00	143.878.520
Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil		3.691.382.400	3.547.503.880	96,10	100,00	143.878.520
1	Pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	2.877.100.000	2.740.176.480	95,24	100,00	136.923.520
2	Pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil	464.282.400	457.351.400	98,51	100,00	6.931.000

No	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
3	Penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)	350.000.000	349.976.000	99,99	100,00	24.000
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		1.550.582.717	1.536.432.431	99,09	100,00	14.150.286
	Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota	428.252.000	417.240.999	97,43	100,00	11.011.001
1	Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	428.252.000	417.240.999	97,43	100,00	11.011.001
Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar		339.106.169	337.091.318	99,41	100,00	2.014.851
1	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	93.481.340	93.453.959	99,97	100,00	27.381
2	Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing	245.624.829	243.637.359	99,19	100,00	1.987.470
Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/kota		783.224.548	782.100.114	99,86	100,00	1.124.434
1	Pemberian insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	783.224.548	782.100.114	99,86	100,00	1.124.434
JUMLAH		43.529.895.650	41.964.726.761	96,40	97,59	1.565.168.889

Belanja- belanja tersebut dialokasikan berdasarkan belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi diperuntukkan untuk Membiayai Belanja Honorarium pegawai, gaji dan tunjangan pegawai ASN beserta tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN, belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Jambi yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan selaku entitas akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Jambi No. 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah basis akrual. dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

(1) Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(2) Belanja

Belanja diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran atau pemegang kas, Pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (Kuasa BUD).

(3) Surplus/Defisit

Selisih Lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

(4) A s e t

Aset diakui pada saat diterima kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

(5) Kewajiban

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dikonversikan dengan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

(6) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan Kewajiban Jangka Pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari : Pendapatan Yang Ditangguhkan; Cadangan Piutang; Cadangan Persediaan; dan Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyusun Laporan Keuangan ini pada dasarnya berpedoman pada PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah Semua penerimaan rekening kas umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah .

b. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

c. Kebijakan Akuntansi Belanja

d. Kebijakan Akuntansi Beban

1. Beban yang diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan.
2. Beban yang diakui tidak bersamaan dengan pengeluaran kas, apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah signifikan.
 - Beban yang diakui sebelum pengeluaran kas (Beban yang didahului dengan tagihan).
 - Beban yang diakui setelah pengeluaran kas (Beban dibayar dimuka yang telah jatuh tempo)

Beban yang tidak berhubungan dengan pengeluaran kas (Non Kas). Contoh: Beban Penyusutan, Beban Penyisihan Piutang.

e. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

f. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

g. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

h. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

i. Kebijakan Akuntansi Piutang

j. Kebijakan Akuntansi Persediaan

k. Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar

l. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

m. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

n. Akuntansi Kewajiban

o. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam Bab ini diuraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pos pendapatan dan belanja terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, Sedangkan pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana terdapat dalam Neraca.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan surplus/deficit komparatif dengan anggarannya periode 31 Desember Tahun Anggaran 2023.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Kelautan Provinsi Jambi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada periode 31 Desember 2023.

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan

Sesuai susunan DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi setelah perubahan, maka yang menjadi pendapatan yaitu Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pada periode 31 Desember Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Retribusi dianggarkan sebesar Rp. 245.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 220.843.400,00 atau 90,14% dari target yang telah ditetapkan yang bersumber dari retribusi daerah. Target pendapatan ini tidak tercapai dikarenakan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Perikanan Kuala Tungkal yang disebabkan oleh kondisi tempat doocking kapal rusak atau sekitar 50 % yang bisa digunakan hanya untuk satu kapal saja

5.1.2. Belanja

Secara garis besar, belanja terdiri dari dua bagian yakni Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal) dan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai). Anggaran dan realisasi atas masing-masing pos belanja sesuai susunan APBD tersebut, disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran.

Dalam catatan atas Laporan Keuangan ini, disajikan informasi rincian pos belanja sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 31 Desember 2023	
			Rp	%
1	Belanja Operasi	37.488.146.192,00	36.271.410.189,00	96,75
2	Belanja Modal	6.041.749.458,00	5.654.646.426,00	93,59
	Jumlah	43.529.895.650,00	41.926.056.615,00	96,32

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja baik Belanja Operasi dan Belanja Modal pada LRA (Laporan Realisasi Anggaran) seluruhnya berada dibawah alokasi anggaran yang disediakan sehingga menghasilkan efisiensi sebesar 96,32%.

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi dipergunakan untuk pembayaran belanja pegawai, hibah dan belanja barang yang ada pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi.

Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Belanja Pegawai	20.128.725.992,00	19.247.604.220,00	95,62
Belanja Barang dan Jasa	17.359.420.200,00	17.023.805.969,00	98,07
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Jumlah	37.488.146.192,00	36.271.410.189,00	96,75

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 19.247.604.220,00 atau 95,62% dari anggarannya. Anggaran belanja pegawai ini termasuk kedalam Belanja yang digunakan untuk membiayai pembayaran honorarium pegawai, pengeluaran gaji dan tunjangan beserta Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 17.023.805.969,00 terdiri dari belanja barang yang dianggarkan untuk membiayai pengeluaran belanja barang pakai habis seperti ATK, belanja cetak dan pengandaan. Sedangkan untuk belanja jasa yang dianggarkan untuk membiayai pengeluaran seperti belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan asuransi, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa gedung dan bangunan, belanja sewa aset tetap lainnya, belanja jasa konsultasi konstruksi, belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

(3) Belanja Hibah

Anggaran untuk hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan untuk tahun 2023 tidak ada atau sebesar Rp. 0,00.

(4) Belanja Bantuan Sosial

Anggaran untuk bantuan sosial tahun 2023 tidak ada atau sebesar Rp. 0,00.

2) Belanja Modal

- (1) Belanja Modal dipergunakan untuk membiayai kegiatan bersifat investasi (menambah aset daerah) yang berkaitan dengan kebutuhan aparatur daerah

dan secara langsung mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi. *Output* atas belanja modal tersebut menghasilkan barang/jasa, dan menambah nilai aset serta ekuitas diinvestasikan yang tercatat dalam Neraca.

(2) Ringkasan anggaran dan realisasi belanja modal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi periode 31 Desember Tahun 2023 dikelompokkan sebagai berikut :

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.862.549.458,00	3.556.084.860,00	92,07
Belanja Modal Bangunan Dan Gedung	700.000.000,00	639.199.000,00	91,31
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.479.200.000,00	1.459.362.566,00	98,66
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	6.041.749.458,00	5.654.646.426,00	93,59

PENJELASAN POS-POS NERACA

1. Aset

1.1 ASET LANCAR	Rp	687.830.106,00
------------------------	-----------	-----------------------

Aset Lancar per 31 Desember 2023 terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar di muka dan persediaan.

1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.	0,00
---	-------------

Kas tersebut merupakan saldo kas yang berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun 2023 (Sisa UYHD).

1.1.2 Persediaan	Rp	687.830.106,00
-------------------------	-----------	-----------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai persediaan yang berada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi berdasarkan Stok Opname pada tanggal 31 Desember 2023 yang berupa:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Persediaan ATK	721.100,00
2.	Persediaan Bahan Kebersihan	272.061,00
3.	Persediaan Pakan Ikan	3.320.000,00
4.	Persediaan Bahan/Bibit ternak/bibit ikan	683.516.945,00
	JUMLAH	687.830.106,00

1.2 Investasi Jangka Panjang **Rp 0,00**

1.3 Aset tetap **Rp 60.455.479.501,70**

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 terdiri atas:

1.3.01	Tanah	Rp	0,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	Rp	33.704.673.749,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	Rp	44.770.959.370,00
1.3.04	Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp	35.633.578.212,06
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	Rp	49.500.000,00
1.3.06	Konstruksi dalam pengerjaan	Rp	209.337.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	Rp	<u>(53.912.568.829,36)</u>
	Jumlah Aset Tetap	Rp	60.455.479.501,70

1.5 Aset Lainnya **Rp 236.118.499,99**

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2023 terdiri atas:

1.5.03	Aset tidak berwujud	Rp	28.994.319,00
1.5.04	Aset Lain-lain	Rp	267.891.500,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi	Rp	(28.994.319,01)
1.5.06	Akm peny. Aset lainnya	Rp	<u>(31.773.000,00)</u>
Jumlah Aset Lainnya		Rp	236.118.499,99

1.3.1 Tanah

Jumlah nilai Tanah periode 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 karena pencatatannya sudah dimutasikan ke aset BPKPD.

1.3.02 Peralatan dan Mesin

Jumlah nilai Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2023 sebesar Rp 33.704.673.749,00 terdiri dari :

- a. Nilai perolehan peralatan dan mesin per 31-12-2022 sebesar Rp 30.066.721.249,00
- b. Kapitalisasi alat rumah tangga karena BJS sebesar (Rp 22.251.060,00)
- c. Reklas kurang alat angkutan roda 2 (angkutan darat bermotor) ke aset lain-lain sebesar (Rp 17.873.000,00)
- d. Reklaas kurang alat kantor lainnya ke gedung tempat kerja sebesar (Rp 59.900.000,00)
- e. Reklaas kurang alat rumah tangga dari alat pembersih ke bangunan dan gedung sebesar (Rp 49.800.000,00)
- f. Reklaas tambah alat pengolahan dari bangunan air sebesar Rp 266.916.000,00
- g. Reklaas tambah alat rumah tangga dari bangunan air irigasi lainnya sebesar Rp 167.540.000,00
- h. Penyesuaian kurang belanja modal alat laboratorium sebesar (Rp 6.150.000,00) karena merupakan belanja barang dan jasa (BJS)
- i. Kapitalisasi Alat Rumah tangga sebesar (Rp. 409.800,00)

- j. Kapitalisasi Peralatan Komputer sebesar (Rp. 3.128.500,00)
- k. Mutasi kurang Alat Rumah tangga yang merupakan BJS (Rp. 397.000,00)
- l. Mutasi kurang Alat Studio karena merupakan Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat sebesar (Rp. 110.928.000,00)
- m. Mutasi kurang Alat Komunikasi yang merupakan Barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar (Rp. 40.050.000,00)
- n. Mutasi kurang Alat khusus Kepolisian yang merupakan Barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar (Rp. 25.519.000,00)
- o. Penyesuaian Unit Alat Laboratorium yang merupakan BJS sebesar (Rp. 15.610.000,00)
- p. Penyesuaian Alat Pelindung yang merupakan BJS sebesar (Rp. 572.000,00)
- q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.556.084.860,00

1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2023 sebesar Rp 44.770.959.370,00

Merupakan total nilai Gedung dan Bangunan, terdiri dari:

- a. Nilai perolehan gedung dan bangunan per 31-12-2022 sebesar Rp 45.723.058.370,00
- b. Reklas kurang Bangunan Tempat Kerja sebesar (Rp. 2.365.817.000,00) terdiri dari :
 - Reklas ke Jaringan Rp. 138.874.000,00
 - Reklas ke Instalasi Air bersih Rp. 33.450.000,00
 - Reklas ke Bangunan Air Bersih Rp. 89.000.000,00
 - Reklas ke Jembatan Rp. 1.654.743.000,00
 - Reklas ke Jalan Rp. 326.600.000,00
 - Reklas ke Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Rp. 123.150.000,00

- c. Reklas tambah Bangunan gedung Tempat Kerja sebesar Rp. 874.197.000,00 terdiri dari :
 - Reklas dari Alat Rumga Rp. 49.800.000,00
 - Reklas dari Alat Kantor Rp. 59.900.000,00
 - Reklas dari Bangunan Air Rp. 693.146.000,00
 - Reklas dari Instalasi Lain Rp. 71.351.000,00
- d. Reklas kurang Bangunan Tempat Kerja ke KDP berupa Perencanaan Pabrik Es sebesar (Rp. 99.678.000,00)
- e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 639.199.000,00

1.3.4 Jalan, Jaringan dan Instalasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Instalasi periode 31 Desember 2023 Sebesar Rp. 35.633.578.212,06.

Merupakan total nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi terdiri dari:

- a. Nilai perolehan Jalan, jaringan dan instalasi per 31-12-2022 sebesar Rp 33.007.351.646,06
- b. Reklas kurang Bangunan Air Irigasi sebesar (Rp. 434.456.000,00) terdiri dari :
 - Reklas ke Alat Rumga Rp. 167.540.000,00
 - Reklas ke Alat Pengolahan Rp. 266.916.000,00
- c. Reklas kurang Bangunan Pengairan Pasang Surut ke Bangunan Tempat Kerja sebesar (Rp. 693.146.000,00)
- d. Reklas kurang instalasi lain ke Bangunan Perikanan (Rp. 71.351.000,00)
- e. Reklas tambah Jalan dari Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp. 326.600.000,00
- f. Reklas tambah Jembatan dari Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp. 1.654.743.000,00
- g. Reklas tambah Bangunan Pengaman Sungai dari Bangunan gedung Tempat Kerja sebesar Rp. 123.150.000,00
- h. Reklas tambah Bangunan Air Bersih dari Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp. 89.000.000,00
- i. Reklas tambah Instalasi Air Bersih/Baku dari Bangunan Tempat Kerja Rp. 33.450.000,00

- j. Reklas tambah Jaringan Listrik dari Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp. 138.874.000,00
- k. Belanja Modal Jaringan, Jalan dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.459.362.566,00

1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya periode 31 Desember 2023 sebesar Rp 49.500.000,00 merupakan nilai perolehan pada periode 31-12-2022.

1.3.6 Konstruksi dalam pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan periode 31 Desember 2023 sebesar Rp 209.337.000,00.

Merupakan total nilai konstruksi dalam pengerjaan terdiri dari:

- a. Nilai perolehan konstruksi dalam pengerjaan per 31-12-2022 sebesar Rp 109.659.000,00
- b. Reklas tambah KDP dari Bangunan Pengaman sungai/pantai berupa perencanaan Pabrik Es sebesar Rp. 99.678.000,00

1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan pada aset tetap periode 31 Desember 2023 sebesar Rp (53.912.568.829,36).

Merupakan total nilai Akumulasi Penyusutan terdiri dari:

- c. Nilai perolehan akumulasi penyusutan per 31-12-2022 sebesar Rp (50.832.693.464,13)
- d. Adanya selisih kurang Peralatan dan Mesin yang disebabkan karena penyesuaian masa manfaat di semester I sebesar Rp 94.814.966,13
- e. Adanya Selisih kurang JIJ yang disebabkan karena reklas di semester I 2023 sebesar Rp 537.585.192
- f. Adanya selisih penambahan Jalan, Irigasi dan jaringan yang disebabkan karena reklas dan perubahan umur masa manfaat semester I sebesar (Rp 1.420.431.763,22)
- g. Nilai beban penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp 2.291.843.790,19)

1.5 ASET LAINNYA

Rp 236.118.499,99

Saldo Aset Lainnya pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp 236.118.499,99

Merupakan total nilai aset lainnya yang terdiri dari :

- Aset tidak berwujud sebesar Rp 28.994.319,00
- Aset lain-lain sebesar Rp 267.891.500,00 yang merupakan nilai perolehan di tahun 2022 sebesar Rp 250.018.500,00 dan adanya reklas tambah kendaraan roda 2 dan alat angkutan ke aset lain-lain sebesar Rp 17.873.000,00
- Akumulasi amortisasi sebesar (Rp 28.994.319,01)
- Akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar (Rp 13.900.000,00) yang merupakan harga perolehan (kendaraan roda 2 dan alat angkutan) ditahun 2022 dan adanya reklas tambah kendaraan roda 2 dan alat angkutan ke aset lain-lain sebesar Rp 17.873.000,00

KEWAJIBAN

2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2.1.10 Utang Belanja Jasa Kantor

Rp 43.534.478,00

Merupakan beban air, listrik dan internet pada pemakaian bulan desember yang belum dibayarkan yang terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban air	563.725,00
2	Beban listrik	33.508.957,00
3	Beban internet/speedy	9.461.796,00
	JUMLAH	43.534.478,00

3. EKUITAS DANA

Rp 61.335.893.629,71

Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Pendapatan dan Belanja.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan dan belanja. Dengan demikian tidak terdapat aset dan kewajiban yang timbul akibat penerapan basis akrual, sehingga tidak perlu dilakukan rekonsiliasi dari basis akrual ke basis kas.

BAB VI

INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas

Provinsi Jambi terletak dibagian tengah pulau Sumatra, membentang dari pegunungan Bukit Barisan di darat, dataran rendah lahan kering dibagian tengah hingga perairan laut dengan Pulau Berhala dibagian Timur. Kelengkapan bentuk bentang alam Provinsi Jambi ditandai pula oleh keberadaan Taman Nasional Kerinci Seblat Dibarat , Taman Nasional Bukit Tigapuluh, dan Taman Nasional Bukit Duabelas dibagian tengah serta lahan lahan gambut dan Taman Nasional Berbak di bagian timur.

Dilihat dari aspek geografis, Provinsi Jambi mempunyai letak yang strategis karena langsung berhadapan dengan salah satu pusat pertumbuhan dunia “IMS-GT” (Indonesia, Malaysia, Singapura – Growth Tiangle). Dengan posisi itu wilayah ini memiliki keunggulan yang komparatif jika dibandingkan dengan beberapa wilayah provinsi lain di Sumatera.

Sumberdaya alam yang ada dan perlu dikembangkan secara optimal adalah sumberdaya tambang migas, selain itu terdapat juga pertambangan batu bara serta berbagai jenis tambang lainnya.

Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat strategik untuk meningkatkan kinerja aparatur.

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan penting bahwa :

- ***Pada Laporan Realisasi Anggaran*** : dari target pendapatan yang ditetapkan tahun 2023 sebesar Rp 245.000.000,00 telah dapat direalisasi sebesar Rp 220.843.400,00 atau 90,14% yang bersumber dari retribusi daerah. Pada sisi belanja di anggarkan sebesar Rp 43.529.895.650,00 Terealisir sebesar Rp 41.926.056.615,00 atau sebesar 96,32 % . kondisi tersebut berimbas pada realisasi defisit dalam DPA-SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2023. Dari angka defisit yang ditargetkan sebesar Rp 43.284.895.650,00 Dalam realisasinya terjadi defisit sebesar Rp 41.705.213.215,00.
- ***Pada Neraca*** : Posisi Aset pada 31 Desember 2023 sebesar Rp 61.397.301.107,70 Bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp 59.421.922.279,93 terdapat kenaikan sebesar 3,32%.

Jambi, Desember 2023

KEPALA DINAS

ASRAF, S.Pt, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661120 199403 1 006



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Neraca

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	61.379.428.107,71	59.421.922.279,94
1.1	ASET LANCAR	687.830.106,00	1.062.206.979,00
1.1.12	Persediaan	687.830.106,00	1.062.206.979,00
	JUMLAH ASET LANCAR	687.830.106,00	1.062.206.979,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	60.455.479.501,72	58.123.596.800,95
1.3.02	Peralatan dan Mesin	33.704.673.749,00	30.066.721.249,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	44.770.959.370,00	45.723.058.370,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.633.578.212,06	33.007.351.646,06
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	49.500.000,00	49.500.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	209.337.000,00	109.659.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(53.912.568.829,34)	(50.832.693.464,11)
	JUMLAH ASET TETAP	60.455.479.501,72	58.123.596.800,95
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	236.118.499,99	236.118.499,99
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	28.994.319,00	28.994.319,00
1.5.04	Aset Lain-lain	267.891.500,00	250.018.500,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(28.994.319,01)	(28.994.319,01)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(31.773.000,00)	(13.900.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	236.118.499,99	236.118.499,99
	JUMLAH ASET	61.379.428.107,71	59.421.922.279,94
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	43.534.478,00	44.044.163,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	43.534.478,00	44.044.163,00
2.1.06	Utang Belanja	43.534.478,00	44.044.163,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	43.534.478,00	44.044.163,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	43.534.478,00	44.044.163,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	61.335.893.629,71	59.377.878.116,94
3.1	EKUITAS	61.335.893.629,71	59.377.878.116,94
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(38.941.293.127,19)	(27.109.300.038,45)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	41.705.213.215,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS	61.335.893.629,71	59.377.878.116,94
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	61.379.428.107,71	59.421.922.279,94

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
---------------	--------	------	------

Provinsi Jambi, 21-03-2024
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

ASRAF, S.Pt, M.Si
NIP. 196611201994031006

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	245.000.000	220.843.400,00	90,14	424.546.815,00
4.1.02	Retribusi Daerah	245.000.000	220.843.400,00	90,14	424.546.815,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	245.000.000	220.843.400,00	90,14	424.546.815,00
	JUMLAH PENDAPATAN	245.000.000	220.843.400,00	90,14	424.546.815,00
5	BELANJA DAERAH	43.529.895.650	41.926.056.615,00	96,32	33.665.582.238,00
5.1	BELANJA OPERASI	37.488.146.192	36.271.410.189,00	96,75	33.457.703.055,00
5.1.01	Belanja Pegawai	20.128.725.992	19.247.604.220,00	95,62	19.473.430.348,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.359.420.200	17.023.805.969,00	98,07	9.911.984.707,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	0,00	0,00	4.072.288.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	37.488.146.192	36.271.410.189,00	96,75	33.457.703.055,00
5.2	BELANJA MODAL	6.041.749.458	5.654.646.426,00	93,59	207.879.183,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.862.549.458	3.556.084.860,00	92,07	75.886.183,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	700.000.000	639.199.000,00	91,31	116.175.500,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.479.200.000	1.459.362.566,00	98,66	15.817.500,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	6.041.749.458	5.654.646.426,00	93,59	207.879.183,00
	JUMLAH BELANJA	43.529.895.650	41.926.056.615,00	96,32	33.665.582.238,00
	SURPLUS/DEFISIT	(43.284.895.650)	(41.705.213.215,00)	96,35	(33.241.035.423,00)

Provinsi Jambi, 13 Maret 2024
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan

ASRAF, S.Pt, M.Si
NIP. 196611201994031006

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri